

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, Ali. et.al., *Ilmu Perundang-Undangan*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Kalam Ilmu, 2015.
- Agustian, Ary Ginanjar & Gunawan Sumodiningrat, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Apeldoorn, L. J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Jakarta; Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat, Edisi ke-1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- Asplund (ed), Knut D. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2012.
- AR, Hanta Yudha. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)*, Jilid 1, Malang: UB Press, 2011.
- Community, Green Mind. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Friedmann, W. *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, London: Steven & Son, 1971.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hadjon, Philipus M. et.al. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1972.
- Hartono, Sunaryati, *Apakah the Rule of Law itu*, Bandung: Alumni, 1982.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- HuMa, Epsitema Institute, *Seri Tokoh Hukum Indonesia, Satjipto Raharjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epsitema Institute, 2011.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Perlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kusdarini, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Kusnardi, Moh. dan Saragih, Bintang R. *Ilmu Negara, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994.
- Kristeva, Nur Sayid Santoso, *Manifesto Wacana Kiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan tehnik perundang-undangan*, Bandung, Mandar Maju, 1998.
- Lutfi, Mustafa dan Jazim Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang: Alumni, 2009.

- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum FH UII Kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2016.
- Martosowignjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty 1985.
- Na'a, Suprin & I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Nazmi, Didi. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa 2013.
- Putera, Kemal Redindo Syahrul dan Hamzah Halim. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoretis & Praktis Disertai Manual*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Rawls, John, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2006.
- Robbins, Stephen P., *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan, 1994.
- Sabon, Max Boll. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Safaat, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Siregar, Bismar. *Hukum dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Saragih, Bintar R. dan Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994.
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Scheltema, M., “*De Reechsstaat*” dalam J.W.M. Engels, et. Al., *De Rechstaat Herdacht*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwole, 1989.
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sirajudin, Fatkhurohman dan Dian Aminudin. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Subekti, R. *Hukum pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sumodiningrat, Gunawan & Ary Ginanjar Agustian. *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1978.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, cetakan ke-tiga*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Sujiwo, Kabul Arifin, dan Sutjipto. *Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Keadaan Bahaya sebagai Hukum Tata Negara Darurat Positif dan Latar Belakangnya*, Jakarta: Bappit Pusat, Permata, 1960.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung, 2000.
- Symonides, Janusz. *Human Rights: Concept and Standars*. Aldershot-Burlington USA- Singapore-Sydney: UNESCO Publishing, 2000.
- Universitas Brawijaya, Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru, 1989.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: FHPM Universitas Negeri Padjajaran, 1960.

- Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind Hill Co, 1989.
- Wilis, D, Ratna., *Teori-Teori Belajar*, Jakarta: Penerbit Erlangga 1996.
- Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008.
- Wijaya, Made Hendra., *Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) di dalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law*, Bali: Universitas Udayana, 2013.
- Yusdiansyah, Efik & Haposan Siallagan, *Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Medan: UHN Press, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tanggal 21 Mei 1998.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

C. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU-VII/2009.

D. Disertasi

- Attamimi, Abdul Hamid. *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

E. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Arizona, Yance, “*Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Raharjo tentang Negara Hukum Indonesia*”, Paper dipresentasikan dalam 1st *International Indonesia Law Society (IILS) Conference*, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010. Konferensi diselenggarakan atas kerjasama Universitas Utrecht, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan *Indonesian Law Society*, 2010.
- Aziz, Mokhammad Abdul., “*Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perppu No 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)*”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 37, No 1, Januari – Juni 2017.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011.
- Chandranegara, Ibnu Sina. “*Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor 138/PUU-Vi/2009*”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 Nomor 1 April 2012.
- Mahdi, Imam., “*Pembubaran Ormas “Radikal” Dalam Perspektif Perundang-undangan (Kajian Khusus Perppu Nomor 02 Tahun 2017)*”, *Nuansa* Vol X, No 2 Desember 2017, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/648/558>, 8 Juli 2019.
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah Bandung: Seminar Nasional Fakultas Hukum UNPAD, 2000.
- Manan, Bagir. “*Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*”, Makalah, Universitas Padjajaran, Bandung, 1994.
- Elsam, Tim, *RUU Ormas: Melanggar dan Membelenggu Kebebasan Dasar Manusia*, Jakarta: Bahan Diskusi dan Pers Briefing RUU Ormas, 27 Maret 2013.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia- Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jurnal, 2007.
- Hadjon, Philipus M., “*Tentang Wewenang*”, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Kantaprawira, Rusadi, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.

- Kurniawan, M. Beni, “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol 15, No 3 September 2018, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1531>.
- Matompo, Oskar S., “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, Nomor 1, Juni 2004.
- Mawuntu, J. Ronald. “Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XIX, Nomor 5, Oktober-Desember 2011.
- Nalle, Victor Imanuel W. “Asas Contrario Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 2, April 2017.
- Pigome, Martha, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 2, Mei 2011.
- Prasetyaningsing, Rahayu. “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 Tahun 2017.
- Pratiwi, Dian Kus. “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2017.
- Supriyanto, Hadi. “Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif”, (Online) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/jurnal/vol1-1.pdf>, 12 Juli 2019.
- Susanto, Anthon F. “Problematisa Nalar dan Kekuasaan Kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/ 2011” dalam Jurnal Yudisial, Nomor 5/II/2012.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1989), hlm. 30, tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, 20 April 2019.

F. Internet

- Andriyan, Dody Nur, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah, tersedia di http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/PEMBUBARAN_ORMAS, 21 Mei 2018.
- Britannica, Encyclopædia, tersedia di

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 20 April 2019.
- Detiknews, “Ini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas”, (Online) <https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, 12 Juli 2019.
- Ernest, Barker, (1906). *The Political Thought of Plato and Aristotle*. Chapter VII, Section 2: G. P. Putnam's Sons, tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 20 April 2019.
- Fitri, Fransisca. “Mengkritisi RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM”, (Online) <https://yappika-actionaid.or.id/ruu-ormas-dan-potensi-pelanggaran-ham/>, 12 Juli 2019.
- Fernaubun, Petrus dan Victor Mambor, *Catatan Tiga Generasi Hak Asasi Manusia*, tersedia di <https://tabloidjubi.wordpress.com/2007/06/25/catatan-tiga-%E2%80%9Cgenerasi%E2%80%9D-hak-asasi-manusia/>, (19 April 2019).
- G., Wilson, N., (2006). *Encyclopedia of ancient Greece*. New York: Routledge. p. 511. ISBN 0-415-97334-1, tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 20 April 2019.
- http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, 2 Mei 2018.
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20170712/15/670733/ini-pertimbangan-pemerintah-terbitkan-perpu-ormas>, 5 Januari 2019.
- <https://geotimes.co.id/kolom/hukum/pro-kontra-perppu-pembubaran-ormas-hti/>, 17 April 2019.
- <https://hyrra.wordpress.com/2012/03/26/perkembangan-hak-asasi-manusia/>, 18 April 2019.
- <https://kbbi.web.id/organisasi>, 19 April 2019.
- <https://kbbi.web.id/preseden>, 17 April 2019.
- <https://kbbi.web.id/laik>, 19 April 2019.
- <https://kbbi.web.id/organisasi>, 19 April 2019.
- <https://kbbi.web.id/wenang>, 9 Mei 2019.
- https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara%20Nomor%20138-PUU-VII-2009.pdf, tanggal 11 Mei 2019.
- <https://news.detik.com/kolom/d-3565601/perppu-pembubaran-ormas-atau-dialog>, (17 April 2019).
- <https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83>, (19 April 2019).
- <https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83>, tanggal

20 April 2019.

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara%20Nomor%20138-PUU-VII-2009.pdf, 11 Mei 2019.

Hukumonline.com, “Polemik Penolakan Perpu JPSK oleh Yuli Harsono”, (Online)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemi-k-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, 12 Juli 2019.

Hukumonline.com, “Tata Cara Pembubaran Ormas”, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59111cddc92f9/tata-cara-pembubaran-ormas/#ftnref20>, 12 Juli 2019.

Jarvie, 2006, pp. 218–9, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diunduh tanggal 20 April 2019. “Democracy”. Encyclopædia Britannica, tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 20 April 2019.

Kompas.com, “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah”, (Online) <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, 12 Juli 2019.

Kompas.com, “Kemenkumham: Pembubaran HTI Berdasarkan Data dan Fakta,” (Online) <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10553011/kemenkumham--pembubaran-hti-berdasarkan-data-dan-fakta>, 12 Juli 2019.

Kompas.com, “Kritik Yusril terhadap Ketentuan Pidana Dalam Perppu Ormas”, (Online) <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas?page=all>, 12 Juli 2019.

Kompas.com, “Pengesahan UU Ormas, Antara Ancaman Radikalisme dan Alat Represi”, (Online) <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/05310091/pengesahan-uu-ormas-antara-ancaman-radikalisme-dan-alat-represi?page=all>, 12 Juli 2019.

Mahkamah Konstitusi RI, “Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Dengan Asas Due Process of Law”, (Online).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2011, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, tersedia di <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>, (19 April 2019).

- Republika.co.id, “Guru Besar: Ketentuan Pidana di Perppu Ormas Perlu Dikritisi”, (Online)
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/02/ox7dcf330-guru-besar-ketentuan-pidana-di-perppu-ormas-perlu-dikritisi>, 12 Juli 2019.
- Scott, Robert, Henry George Liddell, "A Greek-English Lexicon", at Perseus, tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, 20 April 2019.
- Tempo.co, “Perpu Ormas Disahkan, Berikut Aturan Krusial Yang Dipersoalkan”, (Online)
<https://nasional.tempo.co/read/1027623/perpu-ormas-disahkan-berikut-aturan-krusial-yang-dipersoalkan>, 12 Juli 2019.
- United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948, Siracusa Principles, on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, (New York: American Association for the International Commission of Jurists), April 1985, tersedia di <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>, 19 April 2019.